

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tapin Prioritaskan Jalan Strategis Provinsi Batu Ampar-Miawa



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/414429/pupr-tapin-prioritaskan-jalan-strategis-provinsi-batu-ampar-miawa>

Rantau (ANTARA) - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapin Rizkanoor mengatakan perbaikan atau peningkatan ruas jalan Batu Ampar-Miawa Kecamatan Piani menjadi prioritas mengingat tingkat kerusakan membahayakan serta salah satu jalan strategis provinsi menuju Bendungan Tapin.

"Sebulan atau dua bulan ini akan ditender ulang proyek jalan tersebut," ujarnya di Rantau, Kabupaten Tapin, Minggu.

Rizkan mengatakan proyek senilai Rp2,5 miliar ini sebelumnya gagal tender karena adanya *refocusing* anggaran dari pemerintah daerah.

"Akan dilakukan tender ulang dan terbuka," ungkapnya.

Rizkan menuturkan proyek ini diperjuangkan rampung pada tahun ini dengan hasil yang maksimal sesuai kebutuhan medan di dataran tinggi Kecamatan Piani itu.

"Proyek ini harus kita segerakan untuk menjawab keluhan masyarakat, karena kondisi jalan rawan membahayakan untuk lalu lintas jalan," ungkapan.

Selebihnya, dikatakan dia, untuk spesifikasi proyek tak ada perubahan tanjakan, turun hingga lereng yang rawan longsor jadi sorotan pengerjaan.

"Mudah-mudahan tak ada hambatan dan dapat berjalan lancar," ujarnya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/414429/pupr-tapin-prioritaskan-jalan-strategis-provinsi-batu-ampar-miawa>, 12 Mei 2024.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/05/12/akses-mengajar-di-desa-pipitak-jaya-warga-desa-miawa-tapin-ini-keluhkan-jalan-licin-dan-berbahaya>, 12 Mei 2024.

Catatan:**Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:**

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Usuran Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usuran Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

- 4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
 - b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

- c. belanja tidak terduga;
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - d. belanja transfer.
Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa (Pasal 55)
- 5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));
- 6) Belanja modal meliputi:
- a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisinya dipakai;
 - b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
 - c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai;
 - d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai;
 - e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai; dan
 - f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. (Pasal 65)